

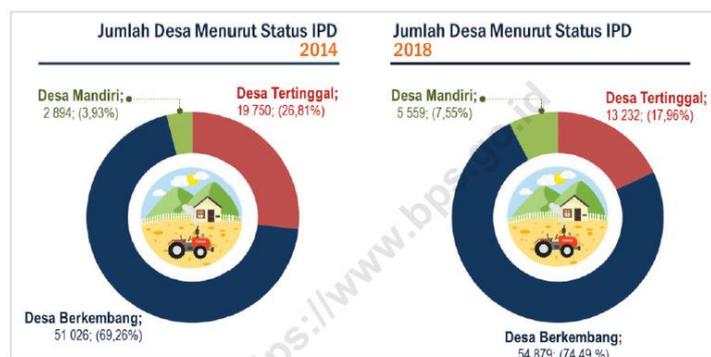
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan adalah bagian dari pendukung program di setiap sektor wilayah. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Desa, sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subjek pembangunan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan.

Desa sebagai subjek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan dan pemberdayaan. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Pengukuran Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada tahun 2018 mencakup semua wilayah administrasi desa wilayah di Indonesia sesuai aturan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Khususnya pada pasal 74 tentang kebutuhan pembangunan desa dan pasal 78 tentang tujuan pembangunan desa.

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) Kebutuhan Dasar; (2) Pelayanan Dasar; (3) Lingkungan; dan (4) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan pasal 78 tujuan pembangunan desa meliputi: (1) Kesejahteraan Masyarakat; (2) Kualitas Hidup; dan (3) Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini diwujudkan melalui (1) Kebutuhan Dasar; (2) Sarana; (3) Prasarana; (4) Pengembangan Ekonomi Lokal; dan (5) Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan.



Gambar 1.1 Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa, 2014 dan 2018

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Pada Tabel 1.1 nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) paling besar terdapat dipulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di pulau papua (35,57) dan pulau Sulawesi memiliki indeks 60,63.

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Desa Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa Di Indonesia

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD	Persentase Desa Menurut Status Desa	Jumlah Desa
		Kondisi Infrastruktur	Tertinggal	
Sumatera	60,02	45,15	4,11	23,241
Jawa-Bali	67,82	54,78	0,26	23,108
Nusa Tenggara	56,25	34,41	1,46	4,043
Kalimantan	56,66	40,9	2,24	6,624
Sulawesi	60,63	44,77	1,46	8,804
Maluku	52,00	34,68	1,28	2,268
Papua	35,57	19,76	8,36	7,348
Indonesia	59,36	44,63	19,17	75,436

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan gambar 1.2 memberikan penjelasan bahwa provinsi Sulawesi berada pada indeks pembangunan desa sebesar 60,63. Dilihat berdasarkan dimensinya, pulau Sulawesi memiliki dimensi indeks pembangunan desa terendah adalah pada kondisi infrastruktur sebesar 44,77. Persentase desa menurut status desa pulau Sulawesi memiliki desa tertinggal adalah sebesar 1,46 dari jumlah desa sebesar 8.804 desa.

Dalam penentuan prioritas pembangunan desa hanya memantau kondisi serta kebutuhan dari desa tersebut sehingga mengakibatkan adanya daftar pembangunan dari desa tersebut tetapi tidak memiliki ketentuan tertentu untuk mengetahui yang mana prioritas pembangunan yang lebih penting. Dari proses tersebut mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak teratur serta pembangunan desa yang tidak efektif dan tidak efisien sehingga memerlukan suatu metode yang menghasilkan sebuah Peringkat untuk penentuan prioritas pembangunan desa daerah tertinggal.

Dalam pembangunan desa masih dilakukan pengamatan yang diukur berdasarkan kekurangan infrastruktur di desa tersebut. Hal ini mengakibatkan pembangunan yang tidak tepat sasaran dan banyak pembangunan yang tidak selesai. Lamanya pembangunan desa bisa disebabkan oleh anggaran yang belum ditetapkan dan masih dalam proses pengajuan atau anggaran sudah ada tetapi tidak cukup untuk melakukan pembangunan di desa tersebut dikarenakan jangka waktu pengerjaan yang tidak mencapai target.

Salah satu metode komputasi yang dapat digunakan untuk melihat ketepatan dalam melakukan penentuan prioritas adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Menurut Limbong dkk (2020) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Metode Dan Implementasi menjelaskan bahwa metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat dijadikan contoh perhitungan yang dipilih paling bagus karena metode ini bisa menemukan alternatif setiap atributnya.

Kemudian ditahapan selanjutnya dibuat Peringkat yang akan memilih alternatif terbaik. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat memberikan pengembangan dalam menentukan prioritas pembangunan pada desa tertinggal dapat diterapkan secara luas sehingga hasil yang didapatkan tepat sasaran, efektif serta memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Berdasarkan fenomena diatas, dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) pada penentuan prioritas pembangunan pada desa daerah tertinggal diharapkan penerapannya sesuai. Maka pada penelitian ini diberikan judul "Penerapan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Desa Pada Daerah Tertinggal.

B. Permasalahan

Penelitian melakukan pengamatan pada 3 (tiga) tempat yaitu Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta kantor Pemerintahan Pasangkayu. Berdasarkan 3 tempat penelitian tersebut terdapat permasalahan dalam penentuan prioritas pembangunan di desa daerah tertinggal, dari hasil wawancara tersebut masih belum menemukan metode dan cara yang tepat untuk menentukan pembangunan yang harus didahului atau diprioritaskan sehingga sering terjadi pembangunan yang tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan kondisi di desa tersebut tetapi pembangunan yang lebih dibutuhkan belum dilaksanakan dan menyebabkan pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran.

Dari permasalahan yang ada, penyusun memilih salah satu desa daerah tertinggal yaitu desa pasangkayu yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu sebelumnya adalah kabupaten mamuju utara. Desa pasangkayu memiliki penduduk berjumlah 3.738 jiwa, terdiri dari 623 KK (Kartu Keluarga) dengan luas 55,83 Km. Dari data tersebut perkembangan penduduk akan terus bertambah setiap harinya, dari perkembangan penduduk tersebut harus diseimbangi dengan perkembangan kondisi pembangunan infrastruktur yang ada.

Pemilihan kondisi pembangunan infrastruktur hanya berdasarkan pembangunan jalan yang ada di desa tersebut. Pada tabel 1.2 menunjukkan nama pembangunan yang memiliki target pembangunan, serta data pembangunan yang sudah terlaksana.

Tabel 1.2 Data Pembangunan Desa Pasangkayu

No	Nama Jalan	Jarak	Anggaran	Waktu Pelaksanaan		Target	Kondisi Jalan	Tipe Jalan
				M	S			
1	Jalan Gn. Latimojo	2 Km	Rp. 1,5 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan Desa
2	Jalan Tuna	2 Km	Rp. 2 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan Desa
3	Jalan Tj. Babia	2,5 Km	Rp. 2,5 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan desa
4	Jalan Slt. Hasanuddin	3 Km	Rp. 3 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan Desa
5	Jalan pahlawan Syafiq	3,5 Km	Rp. 3,5 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan Desa
6	Jalan Andi Depu	4,4 Km	Rp. 4,4 M	2012	2014	2Th	Rusak Berat	Jalan Utama
7	Jalan Moh. Hatta	5,5 Km	Rp. 5,5 M	2012	2014	2Th	Rusak Ringan	Jalan Utama
8	Jalan Mamuju-Kalukku	8 Km	Rp. 8 M	2012	2014	2Th	Rusak Ringan	Jalan Nasional
9	Jalan Majene-Mamuju	10 Km	Rp. 10 M	2012	2014	2Th	Rusak Ringan	Jalan Nasional
10	Jalan Poros Palu-Mamuju	15 Km	Rp. 15 M	2012	2014	2Th	Rusak Ringan	Jalan Nasional
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai (M) - Selesai (S) - Tahun (Th) 								

Pada tabel 1.2 merupakan data pembangunan jalan di desa pasangkayu yang telah ditentukan jalan yang akan dilaksanakan, jarak jalan yang akan dibangun, serta anggaran yang akan digunakan dan waktu pelaksanaan yang telah di tetapkan.

Tabel 1.3 Data Terlaksana Pembangunan Desa Pasangkayu

No	Nama Jalan	Jarak	Anggaran	Jangka Waktu	Kondisi Jalan	Tipe Jalan
1	Jalan Poros Palu-Mamuju	15 Km	Rp. 30 M	24 Bulan	Rusak Ringan	Jalan Provinsi
2	Jalan Majene-Mamuju	8 Km	Rp. 25 M	18 Bulan	Rusak Berat	Jalan Provinsi
3	Jalan Andi Depu	9 Km	Rp. 8 M	10 Bulan	Rusak Ringan	Jalan Nasional
4	Jalan Tuna	6 Km	Rp. 15 M	10 Bulan	Rusak Sedang	Jalan Desa
5	Jalan Slt. Hasanuddin	5 Km	Rp. 5 M	10 Bulan	Rusak Berat	Jalan Desa
6	Jalan Moh. Hatta	5,5 Km	Rp. 10 M	18 Bulan	Rusak Sedang	Jalan Nasional
7	Jalan Mamuju-Kalukku	8 Km	Rp. 12 M	24 Bulan	Rusak Sedang	Jalan Provinsi
8	Jalan pahlawan Syafiq	3,5 Km	Rp. 4 M	18 Bulan	Rusak Sedang	Jalan Desa
9	Jalan Tj. Babia	9 Km	Rp. 11 M	24 Bulan	Rusak Berat	Jalan desa
10	Jalan Gn. Latimojo	6 Km	Rp. 3 M	10 Bulan	Rusak Ringan	Jalan Desa

Dari data tabel 1.3 data terlaksana di desa pasangkayu. Terdapat ketidaktepatan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan, data pembangunan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan data yang telah ditentukan sehingga jalan poros palu-mamuju lebih dahulu dikerjakan daripada jalan Gn. Latimojo. Selain itu penggunaan anggaran pembangunan jalan tersebut, sehingga anggaran yang sudah ditentukan tidak tepat sasaran. Adanya permasalahan yang terjadi karena seluruh anggaran biaya perbaikan jalan yang masuk melebihi dari anggaran biaya yang telah ditentukan, maka pembangunan mengalami kesulitan dalam menentukan ruas jalan mana saja yang harus diperbaiki terlebih dahulu karena harus menyesuaikan dengan anggaran biaya yang telah ditentukan.

Selain itu, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan membuat pembangunan tersebut menjadi lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan terdapat banyak ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, sehingga dalam hal ini pembangunan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Seperti jalan poros palu-mamuju yang memiliki jarak 15 km dengan anggaran yang telah ditentukan adalah 15 M, setelah dilaksanakan anggaran yang dikeluarkan adalah 30 M dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan pada data pembangunan selama 2 tahun tetapi saat dilaksanakan waktu pelaksanaan menjadi 3 tahun. Dari data tersebut tidak memiliki Kriteria dengan data kuantitatif dan bobot penilaian, penilaian hanya dimasukkan secara subjektif atau hanya menggunakan rata-rata dikarenakan belum ditetapkannya bobot atau prioritas kriteria. Penilaian terhadap setiap jalan tidak optimal karena hanya diukur berdasarkan pendapat, perasaan dan sering berubah-ubah.

Maka, kesimpulan dari permasalahan yang timbul adalah ketika anggaran yang sudah ditetapkan dan waktu yang sudah ditentukan, sedangkan hasil dari pembangunan yang sudah terlaksana tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian pembangunan jalan belum dapat ditentukan jalan yang harus diprioritaskan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan perbaikan jalan di desa Pasangkayu, diperlukan perangkingan terhadap jalan yang akan diperbaiki.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum Tepat dalam menentukan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal sehingga pembangunan tersebut tidak tepat sasaran;
- b. Belum efektif dalam proses penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. *Problem Statement* / Pernyataan Masalah
- b. Belum tepat dan efektif dalam penentuan prioritas pembangunan jalan pada daerah tertinggal.
- c. *Research Question* / Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang dapat digunakan adalah:
 - 1) Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat menentukan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal?

- 2) Seberapa tepat dan efektif penerapan *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini adalah menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas pembangunan jalan pada daerah tertinggal.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah :

- a. Mendapatkan prioritas yang tepat dalam menentukan pembangunan desa pada daerah tertinggal;
- b. Mendapatkan proses yang lebih efektif dalam penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal;
- c. Mengembangkan *Prototype* aplikasi penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal;
- d. Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) produk diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam proses penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Alternatif yang digunakan adalah nama jalan yang terdapat di desa pasangayu;
2. Kriteria yang digunakan adalah nama jalan, jarak, anggaran, waktu pelaksanaan, kondisi jalan, dan tipe jalan;
3. Penentuan prioritas pembangunan didapatkan dari hasil perhitungan dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) .

E. Signifikansi Penelitian

Dalam rangka penerapan teknik komputasi pemodelan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal kedalam aplikasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut maka diberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Sebagai sumbangan pengetahuan dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
2. Manfaat praktis, Dengan penentuan prioritas pembangunan jalan pada daerah tertinggal memudahkan dalam menentukan prioritas pembangunan jalan pada daerah tertinggal.
3. Manfaat Kebijakan, Dapat dijadikan acuan dalam rangka pengambilan keputusan khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal secara tepat dan objektif.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah:

- a. Data didapatkan merupakan hasil dari pengamatan yang terjadi di desa pasangkayu;
- b. Penentuan prioritas pembangunan desa pada daerah tertinggal di desa pasangkayu menjadi objek penelitian dikarenakan belum adanya metode yang digunakan dalam menentukan pembangunan di desa tersebut;
- c. Penentuan prioritas pembangunan desa tersebut berdasarkan data yang diajukan melalui kuisioner.

2. Keterbatasan

Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka diberikan batasan penelitian antara lain:

- a. Hanya menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai metode yang akan membahas permasalahan tentang Penentuan Prioritas Pembangunan Desa Pada Desa Tertinggal;
- b. Penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menggunakan kriteria seperti: jarak, anggaran, waktu pelaksanaan, kondisi jalan tipe jalan;
- c. Melakukan pengamatan di daerah desa pasangkayu;
- d. Melakukan pengamatan pada periode tahun 2012-2014.
- e. Pembangunan desa yang dilakukan penelitian hanya untuk penentuan prioritas pembangunan jalan.

G. Definisi Istilah Dan Definisi Operasional

Pada setiap penelitian yang dilakukan mengandung istilah-istilah yang memiliki arti tersendiri, agar menghindari kesalahan dalam pemahaman arti untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan merupakan serangkaian program/kegiatan yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional.
2. Jalan Desa merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
3. Desa Tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim
4. Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal.